

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENCABULAN ANAK**

Studi Kasus Di Wilayah Polres Surabaya Selatan

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



OLEH :

Hartyan Romanda
NPM . 0671010086

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2010**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENCABULAN ANAK
Studi Kasus Di wilayah Polres Surabaya Selatan**

Disusun oleh :

Hartyan Romanda
NPM. 0671010086

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING UTAMA

PEMBIMBING PENDAMPING

Sutrisno.S.H.M.Hum
NIP. 030 193 492

Wiwin Yulianingsih, SH, M.kn
NPT. 375 070 70225

**MENGETAHUI
DEKAN**

.....
NIP.

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENCABULAN ANAK
Studi Kasus di Wilayah Polres Surabaya Selatan**

Disusun oleh :

HARTYAN ROMANDA
NPM. 0671010086

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal :.....**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Prof. Indrati Rini, SH. MS : (.....)
NIP. 130.936.179
2. Haryo Sulistiyantoro, SH. MM : (.....)
NIP. 030.212.027
3. Sutrisno, MH. SHum : (.....)
NIP. 030.193.492

Mengetahui
DEKAN

.....
NIP.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hartyan Romanda
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 20 April 1988
NPM : 0671010086
Konsentrasi : Pidana
Alamat :Jalan Nginden Baru VIII Blok B No.37 Surabaya.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
“UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCABULAN ANAK “ Studi
Kasus Di Wilayah Polres Surabaya Selatan” dalam rangka memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya
ciptaan saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan
hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka,
saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
KAPROGDI

Subani SH, Msi
NIP. 030 174 635

Surabaya,
Penulis

Hartyan Romanda
NPM. 0671010086

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Di sini penulis mengambil judul : “ Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang dilakukan Anak di Wilayah Polres Surabaya Selatan”.

Penyusunan proposal ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Penyusunan proposal skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sumargono, SU selaku pejabat sementara Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH. M.Hum selaku WADEK I Fakultas Hukum yang ramah dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa ataupun memberikan saran kepada mahasiswa.
3. Bapak Sutrisno, SH, M.Hum selaku WADEK II Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberi kemudahan dan solusi kepada penulis.

4. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH, M.Kn selaku Dosen Pendamping yang selalu memberikan dukungan, masukan, dan kesabaran dalam memberikan pengarahan terhadap penulis.
5. Pak Eko Wahyudi, SH, Pak Fauzul S.H.I, M.Hum, Bu Wiwin Yulianingsih, S.H, M.Kn dan Bu Mas Anienda Tien. F, S.H, MH yang selalu bersikap fleksibel dan tidak terkesan formil kepada mahasiswa sehingga menjadikan lebih terbuka dalam berkomunikasi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen program studi Ilmu Hukum yang tidak bisa sebutkan satu-persatu.
7. Seluruh staf TU Fakultas Hukum yang sabar dan ramah dalam melayani mahasiswa.
8. Bapak Soeyono dan Ibu Yuni Susilowati sebagai orang tua yang selalu memberikan pelajaran mengenai arti sebuah kehidupan serta tak henti-hentinya memberikan bantuan dan doa.
9. Kakak tercinta Elova Desteen dan Yeye Borntya Safety yang selalu membuat peneliti lebih berfikir dewasa dalam menilai dan melakukan segala hal.
10. Keluarga besar yang selalu mendukung peneliti Wiwik Utami, Karisna Ramazaki, Citho Aditya Pratama, Janes dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman mahasiswa satu perjuangan yang selalu ada di hati khususya kepada Dony, Fajar, Putu, Rudy, Sigit, Ruben, Reny, Lucia, Kiki, Maya, Leny, Wahib, Ryo, Derry dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan proposal ini kurang dari sempurna, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan, sehingga proposal ini layak dan dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Mei 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN MENGENAL UJIAN SKRIPSI .	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Manfaat Penelitian.....	5
5. Kajian Pustaka	6
a. Pengertian Tindak Pidana	6
b. Pengertian Pencabulan.....	7
c. Pengertian Anak.....	8
d. Pengertian Penegakan Hukum.....	8
e. Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
6. Metode Penelitian.....	9
a. Jenis dan Tipe Penelitian	9
b. Sumber Data	9

c. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	11
d. Metode Analisis Data	11
e. Sistematika Penulisan	12
BAB II. BENTUK PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN	
REPUBLIK INDONESIA	14
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan	14
2. Bentuk Preventif.....	17
3. Bentuk Represif	20
4. Kasus Tindak Pidana Pencabulan.....	24
a. Fakta Hukum.....	24
b. Pertimbangan Hukum.....	25
c. Analisis Hukum.....	27
5. Proses Penanganan oleh Pihak Kepolisian.....	28
a. Skema Proses Penanganan Menurut KUHAP.....	28
b. Penerapan Sanksi Pidana.....	32
c. Skema Proses Penanganan Menurut UU Perlindungan Anak	33
d. Penerapan Sanksi Pidana.....	38
BAB III. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN	
TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH KEPOLISIAN.....	40
1. Upaya Perlindungan Korban oleh Kepolisian.....	40
a. Menurut UU HAM	43
b. Menurut UU Perlindungan Anak.....	44
2. Peran Keluarga	47

3. Peran Masyarakat	48
4. Peran Pemerintah	48
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	49
1. Kesimpulan.....	49
2. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum Kepolisian Republik Indonesia terhadap anak sebagai pelaku pencabulan anak dan mengetahui upaya perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana pencabulan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah, perundang-undangan yang berlaku dan data-data dari Kepolisian Resor Surabaya Selatan, analisa data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Seorang anak dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila anak tersebut mengerti akan akibat perbuatannya sehingga anak tetap diproses dan dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur Kepolisian Resor Surabaya Selatan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Kata Kunci : Upaya Penegakan Hukum, anak, Pencabulan

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Pencabulan yang dilakukan Anak Selama Tahun 2009 di Wilayah Polres Surabaya Selatan.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	: Surat Ijin Penelitian
Lampiran 2	: Surat Perintah Penyelidikan
Lampiran 3	: Surat Perintah Penyidikan
Lampiran 4	: Perintah Penahanan
Lampiran 5	: Surat Pengantar Visum et Repertum

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak positif adalah berkembangnya pembangunan perekonomian di Indonesia. Perkembangan pembangunan perekonomian tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam usahanya untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang memerlukan situasi dan kondisi yang aman dan tertib.

Usaha mewujudkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, pemerintah telah melaksanakan usaha penanggulangan terhadap setiap gangguan keamanan, baik yang bersifat pencegahan atau *preventif* dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, maupun dengan penindakan atau *represif* menindak tegas setiap anggota masyarakat yang melakukan gangguan keamanan atau tindak pidana. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain yaitu semakin berkembang dan variasi pula tindak pidana yang terjadi.

Tindak pidana secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum berupa sanksi pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena perumusan suatu tindakan pidana akan selalu mengacu pada hal-hal diatas. Yakni suatu penentuan apakah suatu perilaku itu merupakan suatu hal yang diancam dengan sanksi pidana atau tidak. Suatu perilaku dikenakan pidana apabila itu dianggap dapat mengancam keseimbangan dalam masyarakat.¹

¹ Muhammad Amin Suma, dkk *Pidana Islam Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta 2001, h.179.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang.

Keberadaan anak dilingkungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian secara khusus, terutama mengenai tingkah lakunya. Kenakalan anak dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan diluar rumah, jika pengaruh lingkungan tidak baik maka anak pasti terpengaruh oleh lingkungan tersebut, karena itu diperlukan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam membimbing dan mengarahkan anak untuk melakukan perbuatan yang baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki seorang anak.

Penyimpangan perilaku kenakalan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat dan disertai dengan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat membawa perubahan sosial serta memberikan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dampak negatif dari pembangunan yang cepat dan arus globalisasi yang pesat telah mempengaruhi perilaku anak,

Penyimpangan perilaku yang dilakukan anak antara lain, perampasan, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan.

Dewasa ini bahkan telah terjadi suatu fenomena yang terjadi bahwa perkosaan dalam pengertian pemaksaan perbuatan pencabulan, baik dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, juga dilakukan oleh orang atau anak laki-laki dengan memposisikan anak laki-laki sebagai korbannya. Hal ini yang biasanya disebut sebagai “sodomi”.²

Kejadian di atas merupakan salah satu contoh tentang perilaku kenakalan anak yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun persoalannya apakah anak yang melakukan tindak pidana dengan latar belakang kenakalan dan karena lemahnya kedudukan anak terhadap orang dewasa, sehingga mereka sangat mudah dijadikan obyek pencabulan dengan berbagai alasan dan sering kali dengan menggunakan modus penipuan berupa iming-iming uang ataupun barang yang disenangi si anak. Jika melihat arti penting anak bagi perkembangan pembangunan bangsa dan negara, pemerintah perlu memberikan aturan secara formal dan materiil untuk pelaksanaan perlindungan anak. Salah satu peraturan yang mengatur tentang anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang Perlindungan Anak.(untuk selanjutnya disingkat UU No.23 Tahun 2002).

Kasus yang dapat peneliti sampaikan sesuai dengan wawancara bersama Kanit V Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Inspektur Satu

² *Ibid*, h. 8

(IPTU) Kurnia Satuan Resort Kriminal Kepolisian Resort Surabaya Selatan Jl.Dukuh Kupang XVI/26-28 Surabaya adalah sebagai berikut :

Yang bernama Beny (tersangka) yang berumur 10 tahun warga Dukuh Kupang dengan Risa (korban) yang berumur 8 tahun yang juga bertempat tinggal juga di daerah Dukuh Kupang. Korban dan tersangka adalah tetangga dekat, saat bermain bersama tersangka mengajak korban bermain dokter-dokteran selanjutnya tersangka mengajak korban masuk ke kamar rumahnya dan menutup pintu kamar tersebut, lalu tersangka menyuruh korban berbaring ditempat tidur kemudian tersangka menyikap pakaian korban serta meraba-raba kemaluan korban juga memasukkan jari tangannya kedalam vagina korban, yang mengakibatkan korban merasakan perih pada saat buang air kecil. Hal tersebut diketahui oleh orang tua atau ibu korban yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian (Pasal yang dipersangkakan 81 UU No.23 Tahun 2002). Untuk tersangka anak dimungkinkan penyidik mengambil tindakan *Restoratif Justice* atau kebijaksanaan diluar prosedur hukum dengan tujuan kepentingan yang terbaik untuk anak. Kasus pencabulan terhadap anak diawali pengaduan oleh pihak korban dan keluarganya terhadap tindak kejahatan yang telah terjadi dengan disertai permohonan untuk segera dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

2. Perumusan Masalah.

- a. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku pencabulan anak yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Surabaya Selatan ?
- b. Apa upaya perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak oleh Kepolisian Resort Surabaya Selatan ?

3. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum Kepolisian di wilayah Polres Surabaya Selatan dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian Surabaya Selatan terhadap korban pencabulan anak.

4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis
 1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan pencabulan anak di Tingkat Kepolisian.
 2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian yang diberikan kepada korban.
 3. Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur mengenai pencabulan anak.
- b. Manfaat praktis

Memberikan pemahaman kepada penulis khususnya mahasiswa dan masyarakat luas mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian kepada korban tindak pidana pencabulan yang semakin meningkat saat ini.

5. Kajian Pustaka

a. Pengertian tindak pidana.

Peristiwa pidana yang juga disebut sebagai tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana / tindak pidana kalau memenuhi unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

1. Obyektif.

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

2. Subyektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)³

Pengertian Tindak pidana dari para ahli hukum diantaranya Menurut Prof. Dr. Wiryono Pradjodikoro, didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, sedang Prof. Moelyanto, S.H menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Kedua definisi tersebut mempunyai kesamaan arti yakni adanya perbuatan yang dilanggar sehingga bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana.⁴

³R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2005 h.175

⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta.2007.h.60

Menurut Drs. CST. Kansil, S.H menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁵

b. Pengertian pencabulan.

Pencabulan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tidak senonoh yang melanggar kesusilaan.

Menurut Pasal 81 UU No.23 Tahun 2002, menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut Pasal 82, menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menurut Pasal 289 Kitab Undang-Undang Pidana, menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

⁵ Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT RadjaGrafindo Persada. Jakarta.2008.h.59 dikutip dari CST, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1986), h.269.

c. Pengertian Anak.

Definisi anak sebagai pelaku tindak pidana menurut ketentuan Pasal 1 ayat

(1) UU No.23 Tahun 2002, menyatakan bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

- (1) Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Anak nakal adalah :
 Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

d. Pengertian Penegakan Hukum

Suharto yang dikutip oleh R.Abdussalam menyebutkan bahwa penegakkan hukum adalah, suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum bersama.⁶

e. Pengertian Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum secara umum dapat diartikan sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta

⁶ R.Abdussalam, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Gagas Mitra Catur Gemilang, 1997, h. 18.

yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.⁷

Kesimpulan dari pengertian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan asusila yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul yang dapat dikenakan hukuman pidana.

6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan “metode penelitian hukum normatif yuridis, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang”.⁸

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. “Data Sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan”.⁹

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum Cet-1*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

⁹ *Ibid*, h.151

a. “Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim)”.¹⁰ Bahan penelitian ini terdiri dari beberapa perundang-undangan:

1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang.

Berdasarkan teori diatas, maka Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian.
- b. ”Bahan Hukum Sekunder, yaitu : Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku

¹⁰ *ibid*, h. 82

ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik)”¹¹.

- c. ”Bahan Hukum tersier, yaitu : bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, (Rancangan Undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia)”.¹²

c. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah data sekunder yaitu studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, Undang-undang, KUHP, KUHAP.¹³

d. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah “metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini”¹⁴

¹¹ *Ibid*, h. 82

¹² *Ibid*, h. 82

¹³ *Ibid*, h. 82

¹⁴ *Ibid*, h. 127

e. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah serta untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan materi skripsi ini, maka perlu dipaparkan sistematika penulisan.

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab yang terdiri dari BAB I akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan permasalahan pertama, yakni pembahasan mengenai upaya penegakan hukum Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, yang terdiri dari beberapa sub-sub bab yakni : faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan, data pencabulan yang dilakukan anak selama tahun 2009 di wilayah surabaya selatan, kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak di wilayah polres surabaya selatan yang didalamnya terdapat fakta hukum dan pertimbangan hukum, upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan oleh pihak kepolisian yang terdiri dari beberapa sub-sub bab yakni : upaya penegakan hukum kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan menurut KUHP, skema proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh pihak Kepolisian di wilayah Surayah Selatan, penerapan sanksi pidana, yang selanjutnya yakni upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku (anak) tindak

pidana pencabulan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002, skema proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh pihak kepolisian di wilayah Surabaya Selatan dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku anak.

BAB III menjelaskan tentang permasalahan kedua, yakni pengertian perlindungan hukum, upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peran masyarakat dan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

BAB IV merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi ringkasan dari serangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi masukan-masukan yang penulis harapkan demi masa depan generasi muda agar terhindar dari adanya tindak pidana pencabulan.

BAB II

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH POLRES SURABAYA SELATAN

1. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan

Manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang terlebih dahulu, padahal apa yang dilakukan tersebut dapat merugikan lingkungan, keluarga dan orang lain, seperti melakukan suatu pelanggaran tindak kejahatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sudah jelas-jelas melanggar peraturan tetapi tetap saja dilakukan. Kejadian semacam ini biasanya terjadi tanpa dipikirkan secara matang. Setelah terjadi baru orang tersebut menyesal atas perbuatannya. Kalau sudah terjadi percuma menyesali, karena proses hukum tetap saja harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Usaha mewujudkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, pemerintah telah melaksanakan usaha penanggulangan terhadap setiap gangguan keamanan, baik yang bersifat pencegahan atau *preventif* yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat,

maupun dengan penindakan atau *represif* yaitu menindak tegas setiap anggota masyarakat yang melakukan gangguan keamanan atau tindak pidana. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain yaitu semakin berkembang dan variasi pula tindak pidana yang terjadi.

Tindak pidana secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum berupa sanksi pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena perumusan suatu tindakan pidana akan selalu mengacu pada hal-hal diatas. Yakni suatu penentuan apakah suatu perilaku itu merupakan suatu hal yang diancam dengan sanksi pidana atau tidak. Suatu perilaku dikenakan pidana apabila itu dianggap dapat mengancam keseimbangan dalam masyarakat.¹⁵

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang.

Keberadaan anak dilingkungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian secara khusus, terutama mengenai tingkah lakunya. Kenakalan anak dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan diluar rumah, jika pengaruh lingkungan tidak baik maka anak pasti terpengaruh oleh lingkungan tersebut, karena itu diperlukan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam membimbing dan mengarahkan anak untuk melakukan perbuatan yang baik. Tanggung

¹⁵ Muhammad Amin Suma, dkk *Pidana Islam Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta 2001, h.179.

jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki seorang anak.

Penyimpangan perilaku kenakalan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat dan disertai dengan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat, tingkat kontrol masyarakat yang rendah artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat membawa perubahan sosial serta memberikan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak serta nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain. Dampak negatif dari pembangunan yang cepat dan arus globalisasi yang pesat telah mempengaruhi perilaku anak, Penyimpangan perilaku yang dilakukan anak antara lain, perampasan, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan.

Maka dari itu kepolisian meminta pada pihak-pihak yang menjadi korban kasus tindak pidana pencabulan itu segera mengadukan secara

resmi dan bersedia memaparkan kesaksiannya, namun rupanya tantangan ini belum juga terjawab. Pihak yang berwajib menuntut adanya bukti-bukti konkrit yang bisa membuat kejelasan mengenai adanya dugaan terjadinya kejahatan seksual.

2. **Bentuk Preventif**

Perubahan yang terjadi secara lambat maupun cepat yang dapat menghadirkan suasana harmonis dan disharmonis, tergantung bagaimana muatan pengaruh yang ditawarkan dan dipaksakan mempengaruhi pola pikir, gaya hidup dan model interaksi sosial, cultural, ekonomi, hukum, dan politik yang dibangunnya. Kemauan yang menjadi potensi dalam diri manusia berperan menjadi penentu atas terjadi dan meledaknya perilaku yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan antar sesama manusia atau sebaliknya aspek kerugian hak asasi manusia (yang selanjutnya disingkat HAM).

Negara Indonesia dapat dijadikan sebagai contohnya, bahwa Negara yang punya falsafah hidup bernama Pancasila dan Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 serta mayoritas beragama islam ini ternyata, masing-masing komponen sosialnya tidak selalu mewujudkan relasi antar manusia secara bertuhan, beradab, berkeadilan dan berkemanusiaan. Tidak sedikit yang menempuh perjalanan hidup ini dengan cara-cara yang liar, amoral, dan bertentangan dengan ajaran agama serta aturan hukum yang berlaku. Mereka memilih jalan hidup yang terbatas untuk memenuhi ambisi, nafsu

liar tanpa peduli bahwa yang dilakukannya merupakan modus perbuatan tindak pidana yang dapat merugikan hak-hak sesama manusia.

Membicarakan perbuatan tindak pidana itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkan di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok dan bersifat institusional dan keorganisasian. Akibat-akibat yang ditimbulkan menjadi tolak ukur suatu modus kejahatan, apakah modus kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan dan merugikan, namun ada pula yang menyatakan bahwa tindak pidana yang terjadi itu benar-benar mengakibatkan penderitaan luar biasa.¹⁶

Hal yang memprihatinkan adalah kecenderungan makin banyaknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai objek pemuas nafsu bejat atau *animalistic* dari seseorang dan kelompok tertentu. Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan itu kemudian menjadi problem yang serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan Negara dimuka bumi ini. Berbagai diskusi, seminar dan pertemuan ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi dan meresahkan masyarakat.

Akibat perilaku tindak pidana seksual yang terjadi di masyarakat tersebut, maka beragam hak-hak asasi manusia menjadi korban. Hak untuk hidup tenang, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk berbeda pendapat dan hak untuk bebas dari ketakutan menjadi sirna dan sedikit-tidaknyanya tidak bisa diperoleh secara maksimal akibat berbagai perilaku kejahatan yang

¹⁶ Abdul Wahid, *Islam dan idealitas Manusia, Dilema Anak, Buruh dan Wanita Modern*, Sipress, Yogyakarta, 1997, h.6.

menimpa dan mengorbankannya. Manusia gagal mendapatkan dan menikmati hak-haknya sebagai warga Negara di Indonesia.

Pihak kepolisian dianggap hanya bersifat pasif atau menunggu pihak-pihak korban yang mau mengadukan kasus kekerasan seksual atau *sexual violence*, dalam hal ini pencabulan terhadap anak yang di alaminya. Padahal, menurut asumsi tersebut, Polri berwenang menggunakan kompetensi yuridisnya untuk mengusut kasus tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang Pokok Kepolisian Negara Nomor 13 Tahun 1961 (yang selanjutnya disingkat dengan UUPKN No.13 Tahun 1961), Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum dalam menyelesaikan revolusi sebagai alat revolusi yang terutama bertugas untuk keamanan di dalam negeri dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tugas Kepolisian Negara diatur dalam Pasal 2 UUPKN No.13 Tahun 1961, yang menyatakan :

- (1) a.Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 b.Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
 c.Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
 d.Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan; dan
 e.Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.
- (2) dalam bidang penelitian mengadakan penyelidikan atas kerjasama dan pelanggaran menuntut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum, Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;
- (3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- (4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berwenang dalam melakukan Upaya Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana adalah Kepolisian. Penegakan hukum itu sendiri dapat di artikan sebagaimana dengan adanya pendapat-pendapat ahli hukum, bahwa:

Menurut Soekanto sebagaimana dikutip oleh Soerjono ini penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian¹⁷.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hakekat dari penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹⁸

3. Bentuk Represif

Dalam hal ini penindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk pelaku pencabulan anak sesuai dengan prosedur hukum yakni penyelidikan dan penyidikan mengacu pada KUHAP dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyelidik mempunyai wewenang sesuai dengan KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, menyatakan :

- a.
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta 1986, h. 3.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, h. 15 dan 24-29.

1. Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Sedangkan dalam penyidikan pelaku pencabulan anak disesuaikan dengan

UU No.23 Tahun 2002, yakni :

- Pasal 41, menyatakan :
 - (1) Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
 - (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
 - (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada:
 - a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
 - b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- Pasal 42, menyatakan:
 - (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
 - (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
 - (3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Dalam hal penyidikan anak oleh pihak Kepolisian jelas berbeda dengan penyidikan orang dewasa, pihak Kepolisian lebih mengutamakan tumbuh kembang anak dan psikologis anak tersebut. Penangkapan dan

penahanannya pun juga harus disesuaikan dengan UU No.23 Tahun 2002, yakni :

- Pasal 43, menyatakan:
 - (1) Penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.
- Pasal 44, menyatakan bahwa:
 - (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 - (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
 - (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
 - (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
 - (6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, atau ditempat tertentu.
- Pasal 45, menyatakan:
 - (1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

- (2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3) Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

a. Data Pencabulan Yang Dilakukan Anak Selama Tahun 2009 di

Wilayah Polres Surabaya Selatan.

No	Bulan	L	S	Ket
1	Januari	1	1	Secara mediasi
2	Februari	-	-	-
3	Maret	5	4	4 Secara mediasi, 1 dilanjutkan keperkara penyelidikan dan penyidikan
4	April	1	1	Secara mediasi
5	Mei	1	1	Secara mediasi
6	Juni	6	5	5 Secara mediasi, 1 dilanjutkan keperkara penyelidikan dan penyidikan
7	Juli	2	2	Secara mediasi
8	Agustus	1	1	Secara mediasi
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	1	1	Secara mediasi
TOTAL		18	16	

Keterangan :

L : Kasus yang telah diterima

S : Kasus yang telah terselesaikan secara mediasi ¹⁹

¹⁹ Wawancara bersama, Kanit V Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Inspektur Satu (IPTU) Kurnia, Satuan Resort Kriminal Kepolisian Resort Surabaya Selatan, Jl. Dukuh Kupang XVI/26-28 Surabaya.

Data tersebut diatas, menunjukkan banyaknya angka tindak pidana yang terjadi di wilayah surabaya selatan. Akan tetapi, untuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak, lebih sering penyelesaiannya berakhir secara mediasi. Kepolisian dalam menangani perkara anak terlebih dulu melakukan mediasi antara keluarga korban dengan tersangka. Kepolisian lebih memperhatikan tumbuh kembang biologis anak tersebut, baik yang menjadi korban maupun tersangka.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pihak kepolisian dianggap hanya bersifat pasif atau menunggu pihak-pihak korban yang mau mengadukan kasus kekerasan seksual atau *sexual violence*, dalam hal ini pencabulan terhadap anak yang di alaminya. Padahal, menurut asumsi tersebut, Polri berwenang menggunakan kompetensi yuridisnya untuk mengusut kasus tersebut.

4. Kasus Tindak Pidana Pencabulan.

a. Fakta Hukum

Kasus yang dapat penulis sampaikan sesuai dengan wawancara bersama Kanit V Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Inspektur Satu (IPTU) Kurnia Satuan Resort Kriminal Kepolisian Resort Surabaya Selatan Jl.Dukuh Kupang XVI/26-28 Surabaya adalah mengenai kasus yang menimpa Risa (8 tahun) warga Dukuh Kupang

dengan tetangganya Beny (10 tahun) yang juga bertempat tinggal di daerah Dukuh Kupang. Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2009 sekitar Pukul 15.30 Beny (tersangka) yang berumur 10 tahun warga Dukuh Kupang dengan Risa (korban) yang berumur 8 tahun yang juga bertempat tinggal juga di daerah Dukuh Kupang. Korban dan tersangka adalah tetangga dekat, saat bermain bersama tersangka mengajak korban bermain dokter-dokteran selanjutnya tersangka mengajak korban masuk ke kamar rumahnya dan menutup pintu kamar tersebut, lalu tersangka menyuruh korban berbaring ditempat tidur kemudian tersangka menyikap pakaian korban serta meraba-raba kemaluan korban juga memasukkan jari tangannya kedalam vagina korban, yang mengakibatkan korban merasakan perih pada saat buang air kecil. Hal tersebut diketahui oleh orang tua atau ibu korban yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian (Pasal yang dipersangkakan 81 UU No.23 Tahun 2002). Untuk tersangka anak dimungkinkan penyidik mengambil tindakan *Restoratif Justice* atau kebijaksanaan diluar prosedur hukum dengan tujuan kepentingan yang terbaik untuk anak.

b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta hukum di atas maka ada beberapa pertimbangan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut yakni :

- a. Adanya korban yang dalam hal ini adalah Risa tetangga dari Beny yang mengalami perih pada saat buang air kecil atau pipis,

akibat Beny memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan atau vagina Risa.

- b. Adanya pelaku tindak pidana yakni Beny tetangga Risa yang melakukan pencabulan terhadap Risa.
- c. Adanya bukti surat laporan atau pengaduan yang dibuat oleh pihak kepolisian berdasarkan atas laporan atau pengaduan korban (Risa) serta bukti visum Laboratorium Forensik dari Rumah Sakit.

Setelah dibuatnya laporan tersebut pihak kepolisian selanjutnya mengadakan penyelidikan dan menangkap tersangka. Pihak Kepolisian mengarahkan kasus tersebut merupakan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak kepada anak sehingga tersangka dikenakan Pasal 81 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

c. Analisis Hukum

Sesuai dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, kasus pencabulan anak yang terjadi di wilayah Polres Surabaya